

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PEMBERIAN VAKSIN TERHADAP PENGURANGAN LAJU PERTUMBUHAN KASUS COVID-19 DI KELURAHAN PEKAPURAN RAYA KOTA BANJARMASIN

Fitriyana¹, Akhmad Nikhrawi Hamdi², Beni Akhmad³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 12, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar, NPM. 17120159

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 12, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar, NIDN. 069409101

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 12, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar, NIDN. 0619081142

ayanafitriyana9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan Pemerintah mengenai pemberian Vaksin untuk mengurangi laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya dan kendala apa saja saat pemberian Vaksin di Kelurahan Pekapuran Raya.

Metode dalam penelitian menggunakan penelitian pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan trigulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Pekapuran Raya sudah melakukan dengan sesuai Kebijakan Pemerintah untuk Pemberian Vaksin terhadap pengurangan kasus Covid-19 namun saja masih Kendala lainnya yang dihadapi yaitu keterbatasannya persediaan, dan pendistribusian vaksin Covid- 19,yang menyebabkan harus menunggu beberapa hari dulu bahkan ada yang tidak mendapatkan/kebagaian nomer antrian karena masyarakat sangat banyak yang ingin di vaksin. Tetapi kendala utama yang terjadi di daerah pekapuran raya itu terkhusus untuk para Lansia yang mana sebagian dari Lansia sudah ingin melakukan vaksinasi namun terhambat dengan bagaimana mereka pergi kelokasi vaksinasi dan juga masih banyak informasi yang mengatakan jika Lansia tidak boleh di vaskin karena dapat menyebabkan resiko yang berbahaya sehingga mengakibatkan tertunda dan bahkan tidak mendapatkan vaksin.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Vaksin,Kelurahan Pekapuran Raya

ABSTRACT

This study aims to find out what are the government policies regarding the provision of vaccines to reduce the rate of growth of Covid-19 cases in Pekapuran Raya Village and what obstacles are when administering vaccines in Pekapuran Raya Village.

The method in this research uses qualitative approach research with descriptive research type. Data collection using observation techniques, interviews, and documentation. The researcher used source trigulation to check the validity of the research data. The data analysis that researchers used in this study used data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the Pekapuran Raya Village has carried out in accordance with the Government Policy for Vaccination against the reduction of Covid-19 cases, but there are still other obstacles faced, namely the limited supply and distribution of the Covid-19 vaccine, which causes having to wait a few days even there are those who don't get the queue number because there are so many people who want to be vaccinated. But the main obstacle that occurs in the Pekalongan Raya area is especially for the elderly, where some of the elderly already want to vaccinate but are hampered

by how they go to the vaccination location and there is also a lot of information that says that the elderly should not be vaccinated because it can cause dangerous risks. resulting in delayed and even not getting the vaccine.

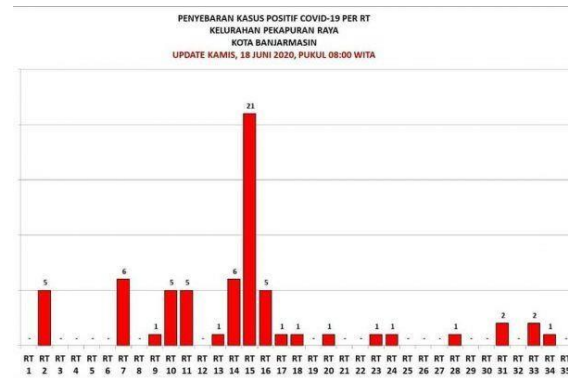
Keywords: Government Policy, Vaccines, Pekapuran Raya Village

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 bukan menjadi rahasia umum lagi seluruh penduduk bumi termasuk Indonesia mengalami musibah yang memilukan yaitu dari pengalaman wabah besar yang dikenal dengan Covid-19. Seluruh segmen kehidupan manusia di muka bumi menjadi terganggu termasuk Indonesia dan juga bahkan sampai tahun 2021 ini masyarakat Indonesia mengalami penderitaan berkepanjangan dari adanya kemunculan satu jenis penyakit menular yang biasa kita dengar di berbagai media massa disepanjang jangka waktu terakhir ini yaitu Covid-19. Wabah ini adalah gejala virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang, berat, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Virus Covid-19 memiliki karakteristik penyakit yang berbeda dengan jenis wabah penyakit yang lain, dan juga virus ini tidak memandang usia, jenis kelamin, maupun ras atau suku tertentu karena wabah ini dapat dengan mudahnya menularkan virus ke setiap orang yang lalai dengan aturan protokol kesehatan sehingga pemerintah membuat beberapa rangkaian kebijakan untuk menanggulangi baik melalui kebijakan yang tertulis hingga kebijakan tidak tertulis. Kebijakan Tertulis ini diantaranya meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dll termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK) dan Surat berasal dari Pemerintah, sedangkan untuk Kebijakan yang Tidak Tertulis bentuknya berupa ajakan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, budaya, agama yang berisi larangan ataupun himbauan terkait dengan pencegahan penanganan Covid-19.

Dampak virus Covid-19 bersifat global dan masif, yang melanda penduduk bumi termasuk Indonesia khususnya wilayah Kelurahan Pekapuran Raya yang sempat teridentifikasi

sebagai “Wilayah Zona Hitam” yang artinya di wilayah tersebut kasus infeksi dan penularan Covid 19 sudah sangat banyak dan adanya lonjakan kenaikan kasus per hari.



Gambar 1 Penyebaran Kasus Positif Covid-19 Per RT

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Pekapuran Raya sempat mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 yang sangat signifikan. Kasus ini tidak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat tetapi ia juga mempengaruhi segala sektor aktivitas masyarakat di wilayah Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin Timur, misalnya seperti aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun, sosial, budaya, psikologis, pemerintahan, pendidikan, dan agama.

Melihat kondisi keadaan ini dari kasus Covid-19 yang masih mewabah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan dalam mengatasi pengurangan dampak dari kasus ini salah satunya, dengan pemberian vaksin covid-19 kepada elemen masyarakat yang dikategorikan harus mendapatkan vaksin ini. Vaksin diharapkan dapat melatih tubuh kenal, lawan, dan kebal terhadap penyebab penyakit, virus atau bakteri. Vaksin bukan obat namun vaksin bisa mendesak pembangunan imunitas khusus pada penyakit Covid-19 supaya bebas dari virus ini. Terkait perencanaan vaksinasi terhadap perihal yang lebih

perinci, disaat ini pemerintah tengah menyusun peta jalur ataupun *roadmap* yang bakal memaparkan mekanisme penerapan vaksinasi Covid- 19 secara merata.

Berdasarkan kondisi diatas yang maraknya kasus Covid-19 di daerah Pekapuran Raya sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kelurahan Pekapuran Raya Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Daerah Banjarmasin Timur Tahun 2021”.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai pemberian vaksin Covid-19 khususnya di wilayah Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin ?
2. Apakah ada kendala dalam proses pemberian vaksin Covid-19 di Wilayah Kelurahan Pekapuran Raya ?

III. FOKUS MASALAH

Karena luasnya wilayah permasalahan Covid-19 ini serta mengingat terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga maka penelitian ini di fokuskan di Wilayah tempat Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin Timur. Berdasarkan dampak yang ada dengan terindikasinya wilayah ini dengan kasus Covid-19 yang paling tinggi di Kelurahan Pekapuran Raya sebagai “Wilayah dengan Zona Hitam”.

IV. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam melakukan vaksinasi khususnya Kelurahan Pekapuran Raya saat maraknya Covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pemberian vaksin Covid-19 di wilayah Kelurahan Pekapuran Raya.

V. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai Sumber Informasi serta bahan acuan tentang Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pemberian Vaksin terhadap Pengurangan Pertumbuhan Laju Covid-19.

VI. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan pendekatan jenis penelitian kualitatif, untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang ingin diteliti. Dasar penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yakni pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya berusaha mendapat gambaran yang nyata mengenai “Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Kelurahan Pekapuran Raya Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid Di Daerah Banjarmasin Timur Pada Tahun 2021”.

VII. HASIL PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 Di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin

Menurut pendekatan yang diteoreman oleh Edward III dalam Agustino (2016:136-141), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi. Sesuai dengan variabel tersebut, adapun kebijakan pemerintah mengenai pemberian vaksin terhadap laju pengurangan laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya antara lain :

a. Komunikasi

Adapun hasil wawancara mengenai kebijakan pemerintah terkait komunikasi pemberian vaksin, wawancara pada karyawan Puskesmas Kelurahan Pekapuran Raya berinisial ER yaitu:

Kami selalu melakukan komunikasi tentang vaksinasi covid kepada warga Kelurahan Pekapuran Raya, entah itu secara langsung dengan turun ke lapangan maupun memberikan informasi secara online seperti

melalui sosial media Instagram yang didalamnya berisi info-info tentang vaksinasi termasuk jadwal vaksinasi.

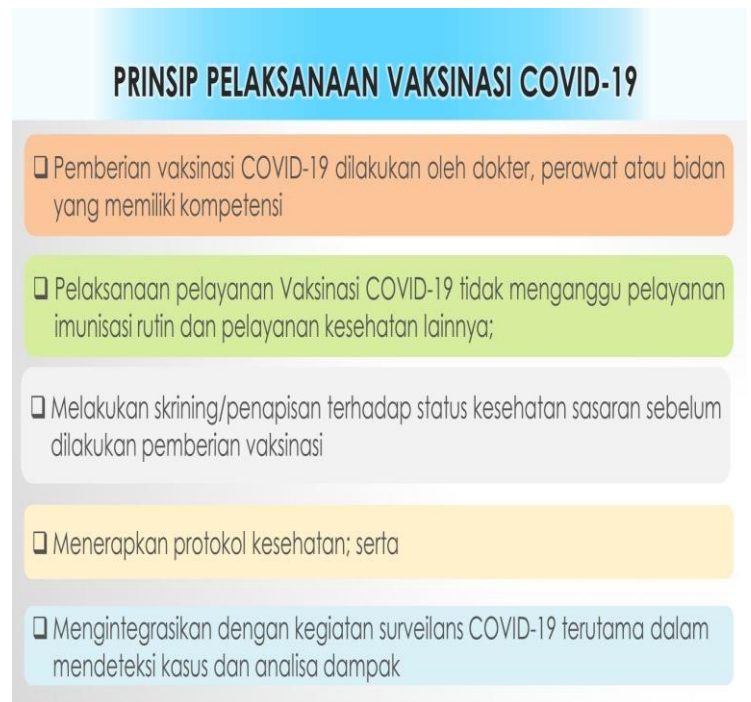
b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan ER juga untuk sumber daya, pemberian vaksinasi dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan yang memiliki kompetensi dalam menunjang kegiatan vaksinasi di Kelurahan Pekapuran Raya, berikut isi wawancara tersebut:

Vaksinasi di Kelurahan Pekapuran Raya dilakukan di Puskesmas oleh tenaga yang memiliki kompetensi seperti dokter, perawat, maupun bidan. Selain itu ada juga petugas yang melakukan skrining dan pendataan terhadap peserta vaksinasi sebelum mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Sedangkan untuk ketersediaan vaksin saat ini masih terbatas, dan belum mampu mencakup seluruh warga yang ada di Kelurahan Pekapuran Raya.

c. Disposisi

Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam melaksanakan kebijakannya, Kelurahan Pekapuran Raya berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan Pengendalian COVID-19.



Gambar 2. Prinsip Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat kelurahan Pekapuran Raya, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi COVID-19 disamping kesakitan dan kematian, sebagaimana sesuai dengan tujuan dari Vaksinasi Covid-19 yaitu:



Gambar 3. Tujuan Vaksinasi Covid-19

Adapun hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi covid-19.

Wawancara dengan kasi kantor Kelurahan Pekapuran Raya yang berinisial ARF bahwa benar Vaksinasi langkah terbaik untuk mehentikan pandemi Covid- 19:

Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, dimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Adapun jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada gilirannya akan menghentikan wabah. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi COVID-19 disamping kesakitan dan kematian. Namun hal yang penting untuk diingat dan menjadi catatan penting, ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih terbatas sehingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman minimal 1-2 meter.

Hasil wawancara dengan informan kunci yang berisial ARY seorang Staff di Kantor kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin menuturkan bahwa :

Kebijakan pemerintah sebenarnya sudah tepat mengadakan vaksin gratis untuk umum khususnya masyarakat daerah kelurahan Pekapuran Raya menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, dimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat COVID- 19.

Pernyataan yang sama juga diperkuat lagi oleh masyarakat yang berinisial ASM karena beliau belum bisa mengikuti vaksinasi yang menyatakan bahwa:

Menurut saya tepat saja , namun vaksinasi bagus saja di gunakan bagi orang yang sehat kalau yang punya penyakit bawaan sebaiknya jangan mengikuti vaksin.

Hal yang di tuturkan oleh Ketua RW Kelurahan Pekapuran Raya yang berinisial SN menurut beliau bahwa :

Sudah sangat tepat kebijakan pemerintah untuk memberikan vaksin apa lagi untuk lansia yang berumur sudah di atas 60 sangat wajib untuk melindungi dari bahaya nya Virus Corona ini dan sangat membantu untuk menguatkan kekebalan tubuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang berhubungan dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi rantai pertumbuhan dan penuluran Virus Covid-19 dengan memberikan vaksinasi gratis untuk umum khusus nya Kelurahan Pekapuran Raya ,menurut dari hasil wawancara di atas memberikan pendapat bahwa untuk kebijakan pemerintah yang di berikan untuk Kelurahan Pekapuran Raya sudah sangat tepat dengan memberikan Vaksin namun ada beberapa masyakat juga membenarkan sudah tepat dengan kebijakan Perintah tersebut namun mereka tidak bisa mengikuti Vaksinasi karena ada masyakat yang mempunyai penyakit bawaan terlebih dahulu maka Vaksinasi tersebut harus di tunda, bahkan untuk lansia di Kelurahan Pekapuran Raya pun juga seperti itu ada juga yang tidak bisa menerima Vaksinasi dan sebab nya pun juga sama dengan masyakat lainya karena ada penyakit bawaan.

Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 – 2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat

dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan. Dari keluarnya surat edaran pemerintah tentang pencegahan dan pengendalian penyakit, apakah sudah tepat pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian vaksinasi ini. Maka dapat di lihat dari hasil wawancara berikut ini.

Setelah seseorang mendapatkan vaksinasi, dibutuhkan waktu untuk pembentukan kekebalan. Kekebalan optimal hanya akan terbentuk bila seseorang mendapat dosis lengkap sesuai jadwal yang dianjurkan. Selama cakupan vaksinasi belum luas, kekebalan kelompok belum terbentuk, potensi penularan masih tinggi. Karena itu, sekalipun telah dilakukan vaksinasi, masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol Kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi).

Di sisi lain, Pemerintah juga tetap akan menggiatkan kegiatan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) untuk penanggulangan Covid-19. Berikut ini adalah gambar strategi penanggulangan

Gambar 4. Strategi Penanggulangan Covid-19

Tidak ada satu pun intervensi tunggal yang mampu menyelesaikan pandemi ini. Kita harus terus meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan penularan yang dikenal dengan istilah 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun). Perilaku 3M harus disertai upaya 3T (Tes, Telusur, Tindak Lanjut) agar kita mampu menghentikan penularan di masyarakat dan menyelamatkan mereka yang menderita Covid-19. Kehadiran vaksin telah memberi banyak harapan agar kita segera terbebas dari pandemi ini. Kombinasi antara upaya 3M, 3T, dan vaksinasi menjadi intervensi penting yang saling mendukung dan tidak terpisahkan satu sama lain.

Wawancara dengan Bapak Lurah Pekapuran Raya Kota Banjarmasin yang berinisial RZ mengatakan bahwa :

Selama cakupan vaksinasi belum luas, kekebalan kelompok belum terbentuk, potensi penularan masih cukup tinggi di kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. Karena itu, sekalipun telah dilakukan vaksinasi, masyarakat masyarakat kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun Di sisi lain, Pemerintah tetap akan menggiatkan kegiatan 3T (Test, Tracing dan Treatment) untuk penanggulangan COVID-19.

Pernyataan juga ada lagi oleh masyarakat yang berinisial ASM karena beliau belum bisa mengikuti vaksinasi yang menyatakan bahwa:

Menurut saya tepat saja, namun vaksinasi bagus saja di gunakan bagi orang yang sehat kalau yang punya penyakit bawaan sebaiknya jangan mengikuti vaksin.

Hal yang di tuturkan oleh Ketua RW Kelurahan Pekapuran Raya yang berinisial SN menurut beliau bahwa :



Covid-19.

Sudah sangat tepat kebijakan pemerintah untuk memberikan vaksin apa lagi untuk lansia yang berumur sudah di atas 60 sangat wajib untuk melindungi dari bahaya nya Virus Corona ini dan sangat membantu untuk menguatkan kekebalan tubuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang berhubungan dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi rantai pertumbuhan dan penularan Virus Covid-19 dengan memberikan vaksinasi gratis untuk umum khusus nya Kelurahan Pekapuran Raya, menurut dari hasil wawancara di atas memberikan pendapat bahwa untuk kebijakan pemerintah yang di berikan untuk Kelurahan Pekapuran Raya sudah sangat tepat dengan memberikan Vaksin namun ada beberapa masyakat juga membenarkan sudah tepat dengan kebijakan Perintah tersebut namun mereka tidak bisa mengikuti Vaksinasi karena ada masyakat yang mempunyai penyakit bawaan terlebih dahulu maka Vaksinasi tersebut harus di tunda, bahkan untuk lansia di Kelurahan Pekapuran Raya pun juga seperti itu ada juga yang tidak bisa menerima Vaksinasi dan sebab nya pun juga sama dengan masyakat lainya karena ada penyakit bawaan.

d. Struktur Birokrasi

Berikut ini struktur birokrasi yang ada di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin



Gambar 5. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Pekapuran Raya Kota

1. Pentahapan Kelompok Prioritas Penerima Vaksin

Dilaksanakan dalam 3 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan Tahapan

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang berusia 18 tahun ke atas.
- 2) Tahap II, dilaksanakan mulai minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas:
 - a) Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).
 - b) Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi tugas di bandara / pelabuhan / stasiun / terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Tahap III, dengan sasaran kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, yang berusia 18 tahun ke atas dan masyarakat lainnya selain kelompok prioritas yang dilakukan vaksinasi pada tahap I dan tahap II, dilaksanakan mulai bulan Juli 2021. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)* serta kajian/rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group*)

Hasil wawancara dengan informan kunci yang berisial SL seorang Petugas Pendaftaran Vaksinasi di kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin menuturkan bahwa :

Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Kelurahan Pekapuran Raya yang berusia ≥ 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas untuk melaksanakan vaksinasi di Kelurahan Pekapuran Raya lebih dari 18 tahun dan berdomisili Indonesia khususnya Kelurahan Pekapuran Raya, untuk saat ini untuk bukan domisili Kelurahan Pekapuran Raya pun juga bisa asal mempunyai KTP dan di atas 18 tahun.

2. Pendataan Sasaran

Pendataan sasaran penerima vaksin dilakukan secara *top-down* melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait atau sumber lainnya meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat tempat tinggal sasaran.

Melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dilakukan penyaringan data (*filtering*) sehingga diperoleh sasaran kelompok penerima vaksin COVID-19 sesuai kriteria yang telah ditetapkan.



Gambar 6. Registrasi dan Sasaran Vaksinasi

Adapun dari hasil wawancara dengan informan kunci yang berisial SH seorang Kasi di Kantor kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin

menuturkan bahwa adapun kreteria yang di tetapkan yang tidak boleh Vaksinasi di Kelurahan Pekapuran Raya yaitu:

- Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh divaksinasi COVID-19
- Orang yang sedang demam dengan suhu $> 37,5$ °C
- Orang dengan hipertensi tidak terkontrol, yaitu tekanan darah $> 180/110$ mmHg (Jika tekanan darah $> 180/110$ mmHg pengukuran tekanan darah diulang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian. Jika masih tinggi maka vaksinasi ditunda sampai terkontrol)
- Orang yang mengalami alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya (vaksinasi dosis 1) maka tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua.
- Orang yang sedang hamil, ditunda sampai melahirkan.
- Orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma, lupus. Vaksinasi ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali.
- Orang yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun dan penerima produk darah/transfusi. Vaksinasi ditunda dan dirujuk.
- Orang yang sedang mendapat pengobatan immunosupresant seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Vaksinasi ditunda dan dirujuk.
- Orang yang memiliki penyakit jantung berat dalam keadaan sesak. Vaksinasi ditunda dan dirujuk.
- Lansia yang dalam pemeriksaannya (sesuai format skrining) menjawab lebih dari 3 pertanyaan dengan jawabannya.
- Orang yang memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya maka vaksin tidak dapat diberikan.

Pernyataan yang sama juga diperkuat lagi oleh masyarakat yang berkerja di Puskesmas Kelurahan Pekapuran Raya yang berinisial ER menurut beliau :

Bukan hanya yang tidak mengikuti vaksinasi aja yang ada ketetapan bahkan yang menerima vaksinasi pun juga akan dapat ketetapan, sebelum vaksinasi di berikan bisa atau tidak nya lagi di berikan vaksinasi ,sasaran dapat memeriksakan terlebih dahulu kondisi kesehatannya sebelum datang ke tempat pelayanan vaksinasi COVID-19. Di tempat pelayanan vaksinasi, juga akan dilakukan skrining/penapisan sebelum vaksinasi yaitu berupa pemeriksaan fisik meliputi cek suhu tubuh dan tekanan darah serta penggalian informasi status kesehatan sasaran melalui pertanyaan standar yang akan diajukan petugas kesehatan. Vaksinasi ditunda atau diberikan dengan syarat Ada beberapa kondisi yang membuat calon penerima vaksin Sinovac tahap pertama terpaksa harus menunda mendapatkan suntikan. Pertama, calon penerima vaksin wajib melakukan pengukuran suhu sebelum pelaksanaan. Jika diketahui bersuhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius atau dalam keadaan demam, maka vaksinasi harus ditunda sampai calon penerima sembuh. Kemudian, calon penerima kembali menjalani proses screening dari awal. Kedua, merujuk pada pertanyaan : "Apakah Anda menderita penyakit Diabetes Melitus ? , apabila penderita diketahui terkontrol dengan HbA1C di bawah 58 mmol/mol atau 7,5 persen, maka mereka berhak diberikan vaksinasi. Ketiga, berdasarkan pertanyaan: "Apakah Anda memiliki penyakit paru (asma, PPOK, TBC)?", maka calon penerima harus menunda mendapat vaksinasi hingga kondisi mereka terkontrol baik. Khusus pasien tuberkulosis yang dalam masa pengobatan, mereka dapat disuntik vaksin minimal setelah dua minggu mengonsumsi obat anti TBC.

Berdasarkan wawancara di atas untuk pemberian vaksin di kelurahan Pekapuran Raya sebelum melaksanakan Vaksinasi wajib cek dulu mulai dari suhu badan, tekanan darah sampai dari riwayat penyakit wajib di pertanyakan kepada petugas karena , kebanyakan orang melaksanakan Vaksinasi itu sangat gemetar karena takut , lalu saja tekanan darah mulai tinggi kebanyakan nya orang – orang tua yang di atas 50 Th. Jadi apabila saat pengecekan itu ada salah satu yang tinggi atau pun ada riwayat penyakit maka Vaksinasi tersebut akan di tunda , seperti tekanan darah di tunda sekitar 20 menit apabila masih tinggi maka Vaksinasi akan di ulang besok hari atau sampai tekanan darah stabil . untuk riwayat penyakit atau mengonsumsi obat–obatan maka di kelurahan Pekapuran Raya tidak akan memberikan Vaksinasi.

3. Tempat Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas, puskesmas pembantu;
2. Klinik;
3. Rumah sakit; dan/atau
4. Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi pelaksana pelayanan vaksinasi COVID-19 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19;
2. Memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memiliki izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau penetapan

oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas pelayanan Kesehatan yang tidak dapat memenuhi persyaratan poin 2 dapat menjadi tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 namun dikoordinasi oleh puskesmas setempat. Adapun alur pelayanan saat Melaksanakan Vaksinasi sebagai berikut



Gambar 7. Alur Pelayanan Vaksinasi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara yang berhubungan dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi rantai pertumbuhan dan penularan Virus Covid-19 dengan memberikan vaksinasi gratis untuk umum khususnya Kelurahan Pekapuran Raya, menurut dari hasil wawancara di atas memberikan pendapat bahwa untuk kebijakan pemerintah yang di berikan untuk Kelurahan Pekapuran Raya sudah sangat tepat dengan memberikan Vaksin namun ada beberapa masyarakat juga membenarkan sudah tepat dengan kebijakan perintah tersebut namun mereka tidak bisa mengikuti Vaksinasi karena ada masyarakat yang mempunyai penyakit bawaan terlebih dahulu maka Vaksinasi tersebut harus di tunda, bahkan untuk lansia di Kelurahan Pekapuran Raya pun juga seperti itu ada juga yang tidak bisa menerima Vaksinasi dan sebabnya pun juga sama dengan masyarakat lainnya karena ada penyakit bawaan seperti paru-paru, ginjal dan lain – lain.

B. Pengaruh Yang Dirasakan Masyarakat Kelurahan Pekapuran Raya Setelah di Vaksin-19

Adapun wawancara dengan seorang masyarakat Kelurahan Pekapuran Raya yang mengikuti Vaksinasi tahap III yang bernisial YD yang dia rasakan setelah Vaksinasi itu bahwa :

Masalah gejala tergantung masyarakat yg sudah di vaksin menimbulkan efek samping masing-masing seperti timbulnya bintik- bintik di kulit, kepala sakit perut mual-mual, mengantuk dan perut menjadi lapar, dan lain-lain. Saya sendiri merasakan efek samping setelah di vaksin mata mengantuk perut menjadi lapar.

Wawancara selanjutnya oleh Masyarakat Kelurahan Pekapuran Raya yang berprofesi sebagai tenaga pengajar yang berisial AS yang saat itu iya mengikuti Vaksinasi Tahap I yaitu : *saya tidak ada merasakan perubahan setelah di Vaksin tahap I maupun tahap II, kalo masalah setelah di suntik itu cuman tanggan saya aja mba yang merasa pegal itu pun sudah sehari setelah Vaksin, malah yang saya rasakan setelah Vaksin itu badan saya lebih segar dan tidak cepat Lelah.*

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pekapuran Raya Kondisi saat di beri Vaksinasi itu sangat berbeda karena setiap orang mempunyai imun yang berbeda ada yang kuat ada yang tidak, jadi setiap orang kondisinya berbeda dirasakan setelah melakukan Vaksinasi tidak mesti sama, ada yang malah menambah stamina setelah mengikuti Vaksinasi tidak hanya mengantuk, pusing bahkan lapar, dan ada pun juga imun yang rendah yang setelah pulang Vaksinasi Jatuh sakit.

C. Kendala Dalam Vaksinasi Covid-19 Warga di Kelurahan Pekapuran Raya

Vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya tidak lepas dari berbagai macam kendala. Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin Covid-19 Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin.

Vaksin Sinovac yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19, telah di lakukan uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin Covid-19. Selain itu, ada pula kendala lain yang dihadapi seperti keterbatasan persediaan vaksin, dan pendistribusian vaksin Covid-19 dan vaksin Covid-19 juga terkadang habis harus menunggu beberapa hari dulu bahkan nomor antrian untuk daftar vaksin pun juga tidak kebagian karena masyarakat sangat banyak yang ingin ikut vaksin, namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh lansia daerah pekapuran sehingga tertunda bahkan tidak mendapatkan vaksin. Ada beberapa faktor yang penyebab terhambatnya vaksinasi lansia di Kelurahan Pekapuran Raya adalah

1. Informasi yang kurang tepat, Masih banyak informasi yang mengatakan jika lansia tidak boleh divaksin karena dapat menyebabkan risiko berbahaya.
2. Para lansia tidak bisa datang ke tempat penyuntikan vaksin yang terlalu jauh dari rumahnya.
3. Para lansia juga enggan menunggu antrian vaksinasi.

Wawancara dengan seorang yang mengikuti Vaksinasi di Kelurahan Pekapuran Raya berinisial IR bahwa :

Saya tidak kebagian Vaksin hari ini karena habis padahal saya sudah datang pagi-pagi ternyata harus daftar terlebih dahulu beberapa hari yang lalu baru bisa kebagian Vaksin , kalo hari ini daftar hari ini juga ngga bakal kebagian seperti saya karena ada kuota terbatas.

Selanjutnya wawancara dengan RW Kelurahan Pekapuran Raya yang berinisial SN bahwa :

Saya sebagai ketua RW juga ada target masyarakat yang diutamakan mengikuti Vaksin yaitu lansia.

Wawancara selanjutnya dengan Bidan yang ada di daerah Kelurahan Pekapuran Raya yang berinisial ML menuturkan :

Lansia berisiko tertular dan kalau tertular, sangat berisiko mengalami kondisi yang berat. Bahkan, sampai kematian. Ini karena penuaan melemahkan sistem imun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kendala dari pemberian Vaksinasi di Kelurahan Pekapuran Raya bukan hanya habis kesediaan Vaksin nya atau antrianya, untuk lansia pun juga ada kendalanya seperti tidak bisa datang ketempat, tidak mau menunggu antrian dll. padahal untuk lansia yang sangat di anjurkan karena lansia yang rentan terserang Covid-19, bahkan yang sudah terdaftar pun lansia sering dan banyak tidak datang di Kelurahan Pekapuran Raya.

VIII. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan dari wawancara pada para informan mengenai kebijakan pemerintah di Kelurahan Pekapuran Raya tentang pemberian vaksin terhadap pengurangan laju pertumbuhan kasus covid-19 di daerah tersebut cukup berpengaruh menurut apa yang dirasakan warga maupun pihak terkait. Berdasarkan pendekatan empat variabel yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2016:136-141), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil sudah cukup tepat walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang diantaranya sebagian masyarakat yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin covid-19 yang menyebabkan beberapa warga di antaranya menolak untuk di beri vaksin. Kendala lainnya yang dihadapi yaitu keterbatasannya persediaan, dan pendistribusian vaksin Covid-19 sehingga vaksinasi belum merata dalam mencakup seluruh warga yang ada di Kelurahan Pekapuran Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solihin. (2004). *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke implementasi*. Jakarta : Rineka Cipta, h. 64.
- AG. Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Amri Marzali. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 20
- Devi, A (2012). *Kepentingan Multinational*

Cooperation (Perusahaan Farmasi) dalam program penanganan Flu Burung oleh WHO di Indonesia. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs

Jenkins, W.I. (1978). *Policy Analysis*, Oxford, Martin Robertson

Puji, A (2014). Kajian Efektivitas Pemberian Vaksinasi Hepatitis B Terhadap Pembentukan Antibodi Anti Hbs. Jurnal Kesmadaska. Prodi D-III Kebidanan. STIKes Kusuma Husada Surakarta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) <https://www.kemkes.go.id/>

Udoji, Chief J.O. (1981). *The African Public Servant As Public Policy in Africa*. Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management. Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Walean, M. (2020). *Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 6, No 96

Yunita, Ekki Tri (2012). Kepentingan Keamanan Kesehatan (*Health Security*) Amerika Serikat dalam Bantuan Penanganan Wabah Avian Influenza di Indonesia. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+implementasi+kebijakan+publik&oq=pengertian+implementasi+kebijakan+publik&aqs=chrome..69i57j0l3j0i22i30l4.14736j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>